



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. UNDANG MUGOPAL, S.H., M.Hum.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KALIMANTAN TENGAH,

(Dr. UNDANG MUGOPAL, S.H., M.Hum.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,

(Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025 :

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025 :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	85%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	80%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	80%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	76%
		Nilai Kinerja Anggaran	90%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.113.902.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.862.671.000,-
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 200.000.000,-
Jumlah		Rp. 8.176.573.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Buntok, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KALIMANTAN TENGAH,



(Dr. UNDANG MUBOPAL, S.H., M.Hum.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,

(Dr. DINO KRISMIARDI, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BERDIT, S.H.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Buntok, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,

(DR. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,

(BERDIT, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025 :

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025 :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	Realisasi anggaran -----x 100 Jumlah pagu anggaran	85%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator IKPA	85%
2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	Jumlah sarana dan prasarana dalam keadaan baik dan operasional -----x 100 Jumlah sarana dan prasarana	85%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kejaksaan Tinggi	Hasil penilaian SAKIP dari Kejaksaan Tinggi	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan Umum	Rp. 53.728.000,-
2.	Layanan Perkantoran	Rp. 6.808.943.000,-
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 200.000.000,-
Jumlah		Rp. 7.062.671.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Buntok, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,

(KRIESMIARDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,

(BERDIT, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTONI KUSUMO, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,



(Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,

(ANTONI KUSUMO, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025 :

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu ----- x 100 Surat perintah pengamanan pembangunan strategis	75%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	<p>1. Jumlah penerima penerangan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penerangan hukum</p> <p>2. Jumlah penerima penyuluhan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penyuluhan hukum</p>	79%
3.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	<p>Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu -----x 100</p> <p>Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan</p>	75%
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	<p>Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu -----x 100</p> <p>Surat perintah PAKEM yang diterbitkan</p>	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan	Rp. 40.000.000,-
2.	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem)	Rp. 58.008.000,-
3.	Pelaksanaan Kampanye Anti Korupsi	Rp. 20.000.000,-
4.	Pelaksanaan Kegiatan Penerangan Hukum	Rp. 38.976.000,-
5.	Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah	Rp. 28.000.000,-
6.	Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Jaksa Menyapa / Om Jak Menjawab	Rp. 24.400.000,-
Jumlah		Rp. 209.384.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Buntok, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,



(Dr. DINO KRISMIARDI, S.H., M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,

(ANTONI KUSUMO, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYA'BUN NA'IM, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN



(Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,

(SYA'BUN NA'IM, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025 :

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025 :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan ----- x 100 Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelesaian Penanganan perkara Tindak Pidana Umum dalam tahap Pra Penuntutan	Rp. 19.300.000,-
2.	Penyelesaian Penanganan perkara Tindak Pidana Umum dalam tahap Penuntutan	Rp. 208.860.000,-
3.	Penyelesaian Restorative Justice Perkara	Rp. 3.088.000,-
4.	Penyelesaian Eksekusi perkara Tindak Pidana Umum dalam tahap Eksekusi dan Upaya Hukum	Rp. 41.980.000,-
Jumlah		Rp. 273.228.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Buntok, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,



(DR. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,



(SYA'BUN NA'IM, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAEFULLAHNUR, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,

(Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,

(SAEFULLAHNUR, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025 :

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025 :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan	75%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan pada tahun berjalan}} \times 100$	75%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan}} \times 100$	70%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan}} \times 100$	70%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan)}} \times 100$	70%
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	<p>Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah pengembalian}} \times 100$	70%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan}} \times 100$	70%
Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan		<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}} \times 100$	70%	
Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi		<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)}} \times 100$	70%	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan	Rp. 92.082.000,-
2.	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan	Rp. 206.000.000,-
3.	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	Rp. 141.728.000,-
4.	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	Rp. 11.080.000,-
Jumlah		Rp. 450.890.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Buntok, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,



(Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,

(SAEFULLAHNUR, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IWAN BUDI SUSILO, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,



(Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,

(IWAN BUDI SUSILO, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025 :

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025 :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	75%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan	75%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100 Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani	75%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	<p>Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata</p>	85%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	85%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp. 30.000.000,-
2.	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Rp. 7.200.000,-
3.	Layanan Pertimbangan Hukum / Pendampingan Hukum / Bantuan Hukum	Rp. 13.200.000,-
4.	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa	Rp. 24.000.000,-
5.	Pengelolaan Halo JPN	Rp. 6.000.000,-
Jumlah		Rp. 80.400.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Buntok, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,



(D. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,

(IWAN BUDI SUSILO, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENDY BAHAR PUTRA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,



(Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PAPBB
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,

(RENDY BAHAR PUTRA, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025 :

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025 :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	<p>Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah, dan lainnya yang ditangani}} \times 100$	80%
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	<p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> $\text{-----} \times 100$ <p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p>	80%
			<p>Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> $\text{-----} \times 100$ <p>Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga,</p>	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			lintas negara Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya -----x 100 Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemeliharaan Barang Bukti / Sitaan / Rampasan	Rp. 35.500.000,-
2.	Pemusnahan Barang Bukti / Sitaan / Rampasan	Rp. 20.700.000,-
3.	Penyelesaian Barang Bukti / Sitaan / Rampasan	Rp. 43.800.000,-
Jumlah		Rp. 100.000.000,-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Buntok, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,



(Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PAPBB
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN,

(RENDY BAHAR PUTRA, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADIS PUTRI NELANIKEN, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI EKONOMI, KEUANGAN, DAN PENGAMANAN
PEMBANGUNAN STRATEGIS PADA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,

(Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI EKONOMI, KEUANGAN,
DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN
STRATEGIS PADA SEKSI INTELIJEN,

(ADIS PUTRI NELANIKEN, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIANTO
Jabatan : KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN, DASKRIMTI, DAN
PERPUSTAKAAN KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,



(Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
KAUR PERLENGKAPAN, DASKRIMTI, DAN
PERPUSTAKAAN KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,

(RIANTO)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I MADE BAYU HADI KUSUMA WIDJAYA, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK
PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 07 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BARITO SELATAN,

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA
SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN
NEGERI BARITO SELATAN,



(Dr. DINO KRIESMIARDI, S.H., M.H.)

(I MADE BAYU HADI KUSUMA WIDJAYA, S.H.)